



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1086, 2018

KEMENDARI. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Dalam Negeri sebagai pencipta arsip diberikan kewenangan untuk menetapkan klasifikasi keamanan dan akses arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
3. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
4. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
5. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

Sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertujuan:

- a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip secara tertib;
- b. memberikan petunjuk kepada unit kerja untuk mengamankan Arsip dan memenuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas Arsip dapat terjaga; dan
- d. memberikan kepastian kewenangan hak Akses Arsip sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Ruang lingkup sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip;
- b. Pengamanan Arsip; dan

c. Akses Arsip.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN, PENGAMANAN DAN AKSES ARSIP

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan Arsip

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. biasa/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia;
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
- (3) Klasifikasi Keamanan Arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- (4) Klasifikasi Keamanan Arsip rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Pengamanan Arsip

Pasal 5

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap fisik Arsip dengan penyimpanan di ruang simpan.
- (2) Ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. pemasangan kamera pengawas (*Closed Circuit Television*);
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media simpan.

Pasal 6

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan Arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia dan sangat rahasia; dan
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip.

Bagian Ketiga
Akses Arsip

Pasal 7

- (1) Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Menteri, pejabat struktural, arsiparis dan pengelola Arsip sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai pada unit kerja setelah mendapatkan izin dari Menteri, pejabat struktural pada unit kerjanya, arsiparis dan/atau pengelola arsip.

Pasal 8

Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 69 TAHUN 2018
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
A ARSIP SUBSTANTIF						
1	120	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Otonomi Daerah
2		Fasilitasi, bimbingan, pengawasan monitoring dan evaluasi a. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Otonomi Daerah
		b. Penyusunan Standar Minimal	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Ditjen Bina

3		Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penataan daerah pembinaan daerah pemekaran	Terbatas	Administrator	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Bangda Ditjen Otonomi Daerah
4		Dekonsentrasi tugas pembantuan dan kerjasama a. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		b. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		c. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring (1) Fasilitasi kecamatan (2) Fasilitasi (3) Database pembentukan kecamatan (4) Koordinasi	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

5	124.1	(5) Pembinaan dan pengawasan (6) Monitoring dan evaluasi (a) Evaluasi kinerja kecamatan				
		d. Fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		e. Fasilitasi pelayanan umum (1) Fasilitasi pelayanan administrasi kecamatan (2) Koordinasi pelayanan administrasi kecamatan (3) Pembinaan pengawasan pelayanan administrasi kecamatan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		Wilayah administrasi dan perbatasan (1) Toponimi dan data wilayah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		(2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

6		pembakuan nama dan evaluasi kegiatan toponimi				
		(3) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		(4) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		(5) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		(6) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah Toponimi dan Batas daerah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		(1) Toponimi Data dan Kodefikasi Wilayah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

7	124.1	(2) Perumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi Pembinaan Umum. Pemberian Bimtek dan Sertifikat dan Pelaksanaan pemantauan evaluasi pelaporan dan Fasilitasi di bidang Topomoni Pembakuan Nama Rupa Bumi, Perubahan Nama, Pemindahan Ibukota Daerah, Pemindahan Pusat Pemerintahan Daerah serta Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		Pengembangan dan penataan batas antar negara				
		a. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		b. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

8	124.1	daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan				
		Batas antar daerah wilayah				
		a. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan Evaluasi penetapan batas antar daerah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		b. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
9	140	Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
		a. Fasilitasi Pengembangan Desa Dan Kelurahan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		1) pelaksanaan pengembangan desa 2) pelaksanaan pengembangan kelurahan				
		b. Administrasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		1) pembinaan administrasi pemerintahan desa 2) pembinaan administrasi				

10	160	pemerintahan kelurahan	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa 1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa 2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa				
		d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 1) pembinaan pengelolaan keuangan desa 2) pelaksanaan pengelolaan aset desa	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		e. Pengembangan Kapasitas Desa 1) pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan 2) pelaksanaan pengembangan kapasitas Fasilitasi, monitoring, dan evaluasi Kepala Daerah dan DPRD, hubungan antar lembaga	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		a. Penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Otonomi Daerah

11	180	b. Administrasi Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Otonomi Daerah
		c. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang pemerintahan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Otonomi Daerah
		d. Hubungan antar lembaga daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Otonomi Daerah
		e. Asosiasi Daerah	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Otonomi Daerah
		Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia (1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum

12	182.1	(2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil (1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pembinaan, pembinaan operasional PPNS	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		(2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pembinaan, pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	Politik Dalam Negeri a. Implementasi kebijakan politik (1) Implementasi kebijakan politik	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Ditjen Polpum

		(a) Sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi (b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi			tugas dan fungsi Kemendagri	
		b. Fasilitasi kelembagaan politik pemerintahan (1) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat - Pendampingan kerja DPR-RI (2) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah - Orientasi anggota DPRD Provinsi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik (1) Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi (2) Partai politik yang tidak memperoleh kursi (3) Pemerintah daerah (4) Database parpol	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		d. Pendidikan Budaya Politik (1) Fasilitasi penyelenggaraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Ditjen Polpum

2	200	pendidikan budaya politik			tugas dan fungsi Kemendagri	
		(2) Penyelenggaraan pendidikan budaya politik				
		(3) Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan				
		Ketahanan Seni Budaya, Adat, Agama dan Masyarakat				
		a. Ketahanan Seni	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(1) Fasilitasi pelaksanaan kesenian				
		(2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian				
		b. Ketahanan Budaya	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan				
		(2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan				
3	210	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
		a. Ketahanan Ideologi Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(1) Penguatan ideologi negara				
		(2) Implementasi ideologi negara				
		b. Wawasan Kebangsaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat	Ditjen

4	270	(1) Penguatan wawasan kebangsaan		Pratama	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Polpum
		(2) Pembinaan dan sosialisasi				
		(3) Implementasi				
		c. Bela Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(1) Pendidikan bela negara				
		(2) Pemberdayaan bela negara				
		d. Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(1) Penguatan nilai-nilai sejarah				
		(2) Implementasi nilai-nilai sejarah				
		(3) Penerbitan rekomendasi penelitian				
		e. Pembauran dan Kewarganegaraan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(1) Pembinaan pembauran kebangsaan				
(2) Pembinaan kewarganegaraan						
		Pemilihan Umum				
		(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(2) Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(3) Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum	Terbatas	Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat	Ditjen

		Presiden dan Wakil Presiden		Pratama	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Polpum
		(4) Laporan perkembangan politik di daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		(5) Laporan kerjasama hasil kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan kehidupan Masyarakat Perbatasan	Rahasia Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya Pimpinan Tinggi Madya	Mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum Mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Ditjen Polpum Ditjen Polpum

		c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Ditjen Polpum
		d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial - pedoman kewaspadaan nasional	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Ditjen Polpum
		e. Fasilitasi Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing (2) surat penelitian orang asing	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum	Ditjen Polpum
2	331.1	Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja (1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja (2) Standarisasi sarana dan prasarana	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

		<p>polisi pamong praja</p> <p>(a) fasilitasi</p> <p>- data pengajuan DAK</p> <p>(b) koordinasi</p> <p>(c) pembinaan dan pengawasan</p> <p>(d) monitoring dan evaluasi</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</p> <p>(1) Fasilitasi koordinasi pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur Pol PP</p> <p>(2) Fasilitasi koordinasi pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja</p>	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
3	340	<p>Perlindungan Masyarakat</p> <p>a. Fasilitasi koordinasi pembinaan dan pengawasan serta monitoring</p>	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Ditjen Bina Adwil

		<p>pelaksanaan perlindungan masyarakat</p> <p>b. Fasilitasi koordinasi pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat</p> <p>Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>a. Identifikasi Potensi Bencana</p> <p>- Evaluasi pelaksanaan pencegahan</p>	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
4	360	<p>b. Organisasi Sistem dan Prosedur bencana dan mitigasi bencana</p> <p>(1) Pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana</p> <p>(a) Fasilitasi</p> <p>-database daerah rawan bencana</p> <p>(b) Koordinasi</p> <p>(c) Fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana</p>	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

5	360	c. Sarana dan Prasarana (1) Evaluasi standarisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana (2) Evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (1) Evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran (2) Evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		Manajemen Penanggulangan Bencana a. Pengurangan Resiko Bencana	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Ditjen Bina Adwil

		b. Sarana dan Prasarana dan Informasi Bencana	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		c. Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		d. Sarana dan Prasarana dan Informasi Kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	410	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	411.2	a. Lembaga Masyarakat (1) Pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa (2) Pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
	412	b. Pembangunan Partisipatif (1) Pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif (2) Pelaporan kinerja pembangunan desa	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
	412.1	c. Potensi Masyarakat (1) Inventarisasi potensi masyarakat (a) profil desa	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
	412.3	d. Pengembangan Kawasan Perdesaan (1) Pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan (2) Pelaksanaan penataan pengembangan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes

	412.25	terpadu kawasan perdesaan e. Pelatihan Masyarakat (1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat (a) grand design pelatihan masyarakat (b) Pedoman pelatihan masyarakat (c) Fasilitasi (d) Monitoring dan evaluasi (2) Evaluasi pelatihan masyarakat (a) penyelenggaraan pelatihan (b) Monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
2	414	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a. Budaya Nusantara (1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat b. Pemberdayaan Perempuan (1) Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes

3	414	(2) Pembinaan perlindungan hak-hak perempuan dan ketidak kesetaraan gender	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Perempuan (1) Pelaksanaan pemberdayaan keluarga (2) Pembinaan dan kesejahteraan keluarga				
		d. Kesejahteraan Sosial (1) Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial (2) Pelaksanaan penanganan masalah sosial				
		e. Tenaga Kerja Perdesaan (1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja (2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja				
		a. Usaha Ekonomi Masyarakat - Usaha Pertanian dan Pangan - pembinaan dan pengembangan usaha	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes

	414.24	pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan (a) identifikasi data pertanian (b) Fasilitasi (c) Monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		b. Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal (1) Ekonomi perdesaan (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (b) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (c) Monitoring dan evaluasi (2) Masyarakat Tertinggal (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (b) Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (c) Monitoring dan evaluasi				

4	414.2	Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi lingkungan Perdesaan (1) Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan (2) Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan				
		b. Fasilitasi pemanfaatan Lahan dan pesisir perdesaan (1) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lahan perdesaan (2) Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya pesisir perdesaan				
		c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan (1) Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan (2) Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes

5	450	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan (1) Pemetaan Kebutuhan Teknologi Perdesaan (2) Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		e. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan (1) Pelaksanaan pemsarakatan teknologi perdesaan (2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan Teknologi perdesaan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Pemdes
		Agama dan Kepercayaan a. Fasilitasi b. Data Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota c. Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan d. Pelaksanaan kerukunan umat beragama	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
6	471	Pendaftaran Penduduk	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemendagri	Ditjen Dukcapil

471.1	a. Identitas Penduduk (1) Penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil (2) Penyusunan norma, standar dan prosedur kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang biodata, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan KTP-el	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
471.2	b. Pindah Datang Penduduk (1) Fasilitasi data pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI dan pindah datang penduduk antar Negara (2) Penyusunan norma standar dan prosedur kriteria, di bidang pindah datang penduduk di wilayah NKRI dan pindah datang penduduk antar Negara (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI dan pindah	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

471.3	datang penduduk antar Negara c. Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk (1) Fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil di bidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk (2) Penyusunan norma standar dan prosedur kriteria, di bidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk (3) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan dokumen (4) Pendaftaran penduduk	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
471.4	d. Fasilitasi Pendataan Penduduk (1) Fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil di bidang fasilitasi pendataan penduduk	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

		<p>(2) Penyusunan norma standar dan prosedur kriteria, di bidang fasilitasi pengelolaan dokumen pendataan penduduk</p> <p>(3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pendataan penduduk</p> <p>(4) Data penduduk rentan Adminduk</p> <p>(5) Data penduduk non permanen</p> <p>(6) Output pelaksanaan pelayanan keliling</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>(1) Perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring evaluasi dan dokumentasi</p> <p>(2) Penyusunan norma standar dan prosedur kriteria, di bidang</p>	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
--	--	---	----------	---------------	---	-----------------

7	472.	<p>pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi</p> <p>Pencatatan Sipil</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	472.1	<p>a. Pencatatan Kelahiran dan Kematian</p> <p>(1) Data cakupan kepemilikan akta kelahiran anak</p> <p>(2) Data kepemilikan akta kematian</p> <p>(3) Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian</p>	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	472.2	<p>b. Perkawinan dan Perceraian</p> <p>(1) Data kepemilikan akta perkawinan</p> <p>(2) Data kepemilikan akta perceraian</p> <p>(3) Surat kedaerah yang merupakan kebijakan</p>	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

		(4) putusan perceraian dari pengadilan negeri (5) laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan perkawinan dan perceraian				
	472.3	c. Pencatatan Perubahan Status Anak (1) Data perubahan status anak (pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak) (2) Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan perubahan status anak	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	472.4	d. Pencatatan pewarganegaraan (1) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2) Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencatatan pewarganegaraan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	472.5	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi (1) Program kerja (2) Laporan kinerja	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
8	473	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Ditjen Dukcapil

	473.1	a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (1) pengembangan infrastruktur dan jaringan komunikasi data (2) Perencanaan pengembangan system dan aplikasi	Terbatas	Administrator	tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	473.2	b. Pengelolaan dan pelayanan data Kependudukan kepala daerah (1) Pengelolaan data kependudukan (DKB, data ganda data anamoli) (2) Pelayanan data kependudukan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	473.3	c. Pengelolaan data center dan <i>disaster recovery center</i> (1) Pengelolan data center kependudukan (2) Pengelolan <i>disaster recovery center</i>	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	473.4	d. Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (1) Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (2) Pengembangan sumber daya manusia	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

	473.5	<p>teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>(1) monitoring pelaksanaan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</p> <p>(2) Evaluasi pelaksanaan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</p> <p>(3) Pelaksanaan dokumentasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan</p>	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
9	474	Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	474.1	<p>Sub Direktorat Perwilayah</p> <p>(1) Fasilitasi pelaksanaan penyusunan standar kompetensi dan mutasi berupa surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani Urusan Kependudukan di Provinsi dan</p>	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

		<p>Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Fasilitasi penyusunan standar kompetensi penyusunan penilaian pejabat pada unit kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan</p> <p>(3) Fasilitasi dan pembinaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.</p> <p>(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur Dukcapil di Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>(5) Fasilitasi kelembagaan Dukcapil daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>(6) Peningkatan kapasitas Aparatur Dukcapil di daerah Provinsi Kabupaten/Kota</p> <p>(7) Pengelolaan barang milik Negara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>				
--	--	---	--	--	--	--

10	475	(8) Pengelolaan database Pejabat Dukcapil di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	475.1	a. Keamanan Informasi (1) Rekapitulasi jumlah penyerahan kartu SAM hasil personalisasi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota dan produsen/lembaga pengguna (2) Rekapitulasi lembaga pengguna Pemerintah dan non pemerintah yang menggunakan perangkat pembaca KTP-el (3) Rekapitulasi lembaga pengguna yang menggunakan perangkat pembaca KTP-el (4) Rekapitulasi jumlah personalisasi yang telah dilakukan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

	475.2	a. Teknis Pengendalian Pengamanan Sistem (1) Rekapitulasi Kementerian /Lembaga pengguna yang sudah memperoleh Hak Akses Pemanfaatan Data (2) Rekapitulasi Lembaga pengguna yang sudah memperoleh hak akses Pemanfaatan Data (3) Rekapitulasi Lembaga pengguna yang sudah koneksitas dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4) Rekapitulasi Lembaga pengguna yang belum koneksitas dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
	475.3	b. Layanan Administrasi Data Kependudukan (1) Rekapitulasi Nota Kesepahaman (MOU) Kementerian Dalam Negeri/Lembaga pengguna (2) Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga pengguna	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

475.4	(3) Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Kepala Daerah dengan Lembaga Pengguna c. Layanan Teknis Data Kependudukan (1) Rekapitulasi Kementerian/ Lembaga pengguna yang sudah melaksanakan petunjuk teknis (2) Rekapitulasi Lembaga pengguna yang sudah melaksanakan petunjuk teknis (3) Rekapitulasi Kementerian/ Lembaga pengguna yang sudah melaksanakan pemadanan data	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil
475.5	d. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi (1) Monitoring pelaksanaan program fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan (2) Evaluasi pelaksanaan program fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan (3) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan fasilitasi pemanfaatan data dan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Dukcapil

		dokumen kependudukan				
--	--	----------------------	--	--	--	--

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kerjasama Perekonomian (1) Fasilitasi ketahanan di bidang sumber daya alam - sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi (2) Penanganan kesenjangan perekonomian b. Ketahanan Perdagangan dan Investasi Fiskal dan Moneter (1) Fasilitasi identifikasi dibidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter (2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
			Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum

2	500	dan evaluasi				
		c. Pelaku Perekonomian Masyarakat (1) Pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian (2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi (1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian (2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Polpum
		Pengembangan Ekonomi Daerah				
		a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (1) Identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah (2) Pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
b. Promosi Investasi Daerah (1) Pelaksanaan promosi ekonomi daerah (2) Pelaksanaan investasi daerah	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Ditjen Bina Bangda		

3	590	c. Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah (1) Pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah (2) Pelaksanaan perindustrian daerah	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		d. Kemitraan Usaha (1) Perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah (2) Pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		e. Kelembagaan Ekonomi Daerah (1) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah (2) Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		Kawasan dan Pertanahan				
		a. Kawasan Sumber Daya Alam - Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

		pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan				
		<p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara 	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		<p>c. Kawasan Ekonomi Industri dan Perdagangan Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi industri dan perdagangan bebas 	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		<p>d. Pertanahan dan Kawasan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan (2) Penyelesaian sengketa pertanahan (3) Evaluasi penataan kawasan khusus 	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil
		e. Kawasan Perairan Kelautan dan	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat	Ditjen Bina

		Kedirgantaraan			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Adwil
		<ul style="list-style-type: none"> (1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan (2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi (3) Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan 				
		<p>e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan <p>Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring konvensi internasional</p>	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Adwil

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Pembangunan Daerah a. Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah b. Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan informasi pengembangan wilayah c. Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah d. Kawasan Strategis dan Andalan (1) Evaluasi pengembangan data (2) Pengembangan kawasan strategis dan andalan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda Ditjen Bina Bangda Ditjen Bina Bangda Ditjen Bina Bangda

		e. Wilayah tertinggal (1) Penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal (2) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil (1) Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal (2) Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pengawas Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda Ditjen Bina Bangda
2	650	Penataan Perkotaan a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan (1) Evaluasi perencanaan perkotaan (2) Pengendalian penataan perkotaan (3) Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda

3	660	b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah dan Kota Kecil (1) Pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan (2) Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		c. Kerjasama Perkotaan (1) Pengendalian kerjasama perkotaan antar negara (2) Pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan (3) Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup a. Penataan Ruang Wilayah (1) Evaluasi perencanaan pemanfaatan tata ruang wilayah (2) Evaluasi pelaksanaan penyerasian dan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda

		pengendalian tata ruang wilayah (3) Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		b. Penataan Ruang Kawasan (1) Evaluasi tata ruang kawasan (2) Pembinaan tata ruang kawasan (3) Implementasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		c. Konservasi dan Rehabilitasi (1) Evaluasi pelaksanaan konservasi (2) Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi (3) Implementasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air (1) Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air (2) Evaluasi pemanfaatan sumber daya air (3) Implementasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Bangda
		e. Pengendalian Lingkungan Hidup (1) Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Ditjen Bina Bangda

		(2) Analisis dan audit pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup			Kemendagri	
--	--	---	--	--	------------	--

	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	900	<p>Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>(2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Administrator</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p> <p>Tidak memiliki dampak yang</p>	<p>Ditjen Bina Keuda</p> <p>Ditjen Bina Keuda</p> <p>Ditjen Bina</p>

		<p>bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p>(2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan</p> <p>(2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli penyiapan bahan bantuan keterangan</p> <p>(1) Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah</p> <p>(2) Penyiapan evaluasi rancangan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Administrator</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p>	<p>Keuda</p> <p>Ditjen Bina Keuda</p> <p>Ditjen Bina Keuda</p> <p>Ditjen Bina Keuda</p> <p>Ditjen Bina Keuda</p>
--	--	---	--	---	---	--

2	905	peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Ditjen Bina Keuda
		<p>e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah</p> <p>(2) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah</p> <p>(3) Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <p>(1) Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum</p> <p>(2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Ditjen Bina Keuda

		dan evaluasi dana alokasi umum	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Ditjen Bina Keuda
		<p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <p>(1) Koordinasi penyiapan data dasar</p> <p>(2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Ditjen Bina Keuda
		<p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>(1) Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>(2) Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Ditjen Bina Keuda
		<p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>(1) Sosialisasi dan supervisi dana otonomi</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Madya	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif,	Ditjen Bina Keuda

3	910	<p>husus</p> <p>(2) Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</p> <p>(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya</p> <p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>(1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan</p> <p>(2) Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan</p> <p>(3) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan</p> <p>Anggaran Daerah</p> <p>a. Anggaran Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis</p> <p>(2) Evaluasi rancangan perda, anggaran</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Ditjen Bina Keuda
		<p>(1) Fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis</p> <p>(2) Evaluasi rancangan perda, anggaran</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda

4	970	<p>pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi</p> <p>(3) monitoring</p> <p>b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah</p> <p>(1) Penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah</p> <p>(2) Penyusunan tatalaksana anggaran daerah</p> <p>(3) Penyiapan dukungan teknis anggaran daerah</p> <p>(4) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah</p> <p>Pendapatan Investasi Daerah</p> <p>a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>(2) Penyiapan bahan perumusan</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda
		<p>(1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>(2) Penyiapan bahan perumusan</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda

	<p>bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>(3) Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>(4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>b. Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan</p> <p>(2) Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah</p> <p>c. Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>(1) Analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p> <p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p>	<p>Ditjen Bina Keuda</p> <p>Ditjen Bina Keuda</p>
--	---	---------------------------------	---	---	---

	<p>dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>(2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>d. Pengelolaan Kekayaan Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan</p> <p>(2) Fasilitas serta bimbingan teknis investasi daerah</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri</p>	<p>Ditjen Bina Keuda</p>
--	--	-----------------	--------------------------------	--	--------------------------

	<p>e. Pinjaman Obligasi Daerah</p> <p>(1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah</p> <p>(2) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah</p> <p>(3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN</p> <p>(4) Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah</p> <p>(5) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda
	<p>f. Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <p>(1) Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum</p> <p>(2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda

	<p>umum</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum</p>				
	<p>g. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <p>(1) Koordinasi penyiapan data dasar</p> <p>(2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda
	<p>h. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>(1) Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>(2) Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>(3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda
	<p>i. Dana Otonomi Khusus dan Dana</p>	Terbatas	Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Ditjen Bina

	Transfer Lainnya (1) Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus (2) Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya		Tinggi Pratama	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Keuda
	j. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan dana perimbangan (2) Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan (3) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Ditjen Bina Keuda

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
B. ARSIP FASILITATIF						
1	004	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
2	010	Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi telepon, radio, teleks,TV, kabel, dan internet	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
3	011	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya. Risalah/notulen rapat a. Rapat staf b. Rapat pimpinan c. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum

11	025	kendaraan Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
12	027	Pengadaan Barang a. Telaahan pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung b. Dokumen Lelang 1) barang inventaris kantor/barang bergerak, (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang. 2) barang inventaris (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pengawas Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja Seluruh Unit Kerja
13	028	Rencana Kebutuhan Barang	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang	Seluruh Unit

		a. Unit Kerja/Satuan Kerja b. Lembaga (Kementerian Dalam Negeri)			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Kerja
14	028	Penyimpanan barang dan retribusi a. Penyimpanan inventaris kekayaan negara 1) Surat bukti barang masuk 2) Surat bukti pengeluaran barang b. Pendistribusian Surat Jalan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja
15	028	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) a. SIMAK BMN b. Pembukuan BMN 1) Keputusan pembentukan tim 2) Kartu identitas barang c. Daftar Barang ruangan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja
16	028	Inventarisasi BMN 1) Keputusan pembentukan tim 2) Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi 3) Kertas kerja inventarisasi 4) Berita acara inventarisasi 5) Daftar inventarisasi/buku barang/daftar barang	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja

17	028	6) Laporan hasil inventarisasi Penghapusan Barang Milik Negara Pelaksanaan Penghapusan BMN 1) Keputusan Pembentukan tim 2) Berita acara penghapusan BMN 3) Daftar barang yang dihapus 4) Laporan hasil pelaksanaan Penghapusan BMN	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
18	028	Laporan BMN 1) Laporan kondisi barang 2) Laporan barang kuasa pengguna 3) Berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal 4) Laporan persediaan habis pakai 5) Laporan persediaan tidak habis pakai 6) Laporan pengelolaan barang milik negara	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja
19	028	Dokumen kepemilikan aset/kekayaan Kementerian Dalam Negeri (Sertifikat tanah, IMB, BPKP, STNK, Blueprint dan lain-lain)	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
20	040	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang	Puspen

		a. Bukti Induk Koleksi b. Daftar buku terseleksi c. Daftar buku dalam pemesanan d. Daftar buku dalam permintaan e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah f. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus g. Lembar kerja pengolahan BP (Buras, Pengkatalogan) h. Shelf List/Jajaran Kartu Utama (master list) i. Daftar Tambahan Buku (Assesosion list) j. Daftar/Jajaran kendali (Subyek dan pengarang)			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	
21	040	Layanan jasa Perpustakaan dan Informasi a. Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka b. Pertanyaan Rujukan dan Jawaban	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen
22	040	Preservasi bahan Pustaka a. Survei kondisi Bahan Pustaka b. Repografi Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Puspen

23	040	Pembinaan Perpustakaan a. Bimbingan Teknis b. Penyuluhan c. Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen
24	045	Administrasi Persuratan a. Kartu Kendali b. Buku Agenda c. Lembar Pengantar/buku ekspedisi/lembar disposisi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja
25	045	Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja
26	045	Penyusunan Sistem Kearsipan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
27	045	Pembinaan Kearsipan a. Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan/lokakarya/workshop	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum

28	045.41 045.6	b. Bimbingan Teknis Monitoring Supervisi dan monitoring	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
29	045.5	Pengelolaan Arsip inaktif	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
30	045.5	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip a. Daftar Arsip	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
		b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
		c. Daftar Pencarian Arsip	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum

		d. Daftar Arsip Informasi Publik	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
	045.3	e. Daftar Arsip Vital/Aset	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
31	045.32	Layanan Arsip (peminjaman, penggunaan arsip)	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
32	045.34	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
33	045.35	Penyusutan Arsip	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
		a. Peminjaman Arsip Inaktif				
		1) Berita Acara Pemusnahan				
		2) Daftar Arsip yang dipindahkan				
		b. Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang	Biro Umum

		guna			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	
		1) Berita Acara Pemusnahan				
		2) Daftar Arsip yang dimusnahkan				
		3) Rekomendasi/Pertimbangan				
		4) Pemusnahan arsip dari instansi terkait				
		5) Keputusan permohonan				
		c. Penyerahan arsip statis	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
		1) Berita Acara serah terima arsip				
		2)Daftar arsip yang diserahkan				
34		Pengelolaan Arsip Sandi:				
		a. Komunikasi kedinasan biasa	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Umum
		b. Komunikasi kedinasan dalam bentuk kode sandi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin
		c. Hasil Transliterasi sandi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan	Pusdatin

35	050	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan (RPJP) b. Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) c. Rencana strategis (RENSTRA)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Pengawas Pengawas Pengawas	tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin Biro Perencanaan Biro Perencanaan
36	050	Rencana Kegiatan Usulan Rencana Kerja	Terbatas	Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
37	051	Program Kerja Tahunan				

38	051	a. Usulan Program Satuan Organisasi/Kerja beserta data pendukung b. Program Kerja Tahunan Satuan Organisasi/Kerja c. Program Kerja Tahunan Kementerian Dalam Negeri	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Pengawas Pengawas Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan Biro Perencanaan Biro Perencanaan
39		Rencana Kerja berdasarkan pagu indikatif	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
40		<i>New Initiative</i>	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
41		Penetapan /Kontrak Kinerja	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang	Biro

		Menteri Pimpinan satuan organisasi/kerja			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Perencanaan
42		Laporan a. Laporan Berkala 1. Laporan Harian 2. Laporan Mingguan 3. Laporan Bulanan/Laporan Triwulan 4. Laporan semesteran 5. Laporan Tahunan Satuan Organisasi/kerja 6. Laporan Tahunan Kementerian	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
43		Perencanaan Anggaran	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
44		Penyusunan Rencana Anggaran	Terbatas	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
45	061	Struktur Organisasi Kementerian	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang	Biro Ortala

		a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	
46	067	Analisis Organisasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Ortala
47	069	Evaluasi Organisasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Ortala
48	065	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Ortala
49		Standar Kompetensi Jabatan Struktur dan Fungsional	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Ortala
50		Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan	Biro Ortala

51		Struktur/fungsional tertentu/fungsional umum	Biasa/Terbuka	Pengawas	tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Ortala
52		Ketatalaksanaan a. SOP/Prosedur tetap b. Mekanisme kerja/tata hubungan kerja	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Ortala
53		Internalisasi Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Ortala
54		Evaluasi Jabatan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Ortala
55	070	Penelitian, pengkajian dan dan pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja, dan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	BPP

56	070	surat menyurat sampai dengan hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan mulai dari rancangan awal sampai dengan laporan penelitia Sosialisasi dan deminisasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	BPP
57		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian, dan pengembangan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	BPP
58		Forum komunikasi penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	BPP
59		Data Data dan Informasi penelitian dan pengembangan a. Data b. Statistik c. Jurnal hasil penelitian/pengkajian	Biasa/Terbuka	Pengawas	Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	BPP
			Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang	Seluruh Unit

60		Evaluasi pelaksanaan kebijakan	Terbatas	Pengawas	mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Kerja Seluruh Unit Kerja
61		Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	Biasa/Terbuka	Pengawas Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja
62	090	Perjalanan dinas: a. Dalam negeri b. Luar negeri c. surat perintah Menteri d. surat perintah Eselon I dan II e. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1) Kunjungan dinas pimpinan organisasi/instansi (Pejabat Negara dan 2) Kunjungan dinas Pejabat lain/pegawai	Terbatas		Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	180	Program Legislasi Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi Program legislasi Kementerian Dalam Negeri Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum b. Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
2	188	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) Rancangan Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum

		sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum rancangan awal sampai dengan rancangan akhir				
3	188.32	Peraturan/Keputusan Menteri, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
4	188.52	Instruksi/Surat Edaran Instruksi/ Surat Edaran Setingkat Eselon I dan II, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum

5	188.32	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
6	188.42	Nota kesepahaman / <i>memorandum of Understanding</i> (Mou)/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama: a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
7	188.2	Dokumen Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi.	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
8	188.2 188.2	Kasus Sengketa Hukum a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum

	188.2	<p>hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telaah hukum dan opini hukum <p>b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
	188.2	<p>c. Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
	188.2	<p>d. Perburuhan Berkas tentang kasus/sengketa perburuhan:</p> <p>Proses verbal mulai dari penyelidikan,</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum

	188.3	<p>Penyidikan sampai dengan vonis telaah hukum dan opini hukum</p> <p>e. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - berkas pembelaan dan bantuan hukum 	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
		<p>f. Perijinan Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin telaah</p>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Hukum
		<p>g. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak Cipta - Hak Paten - Paten Biasa - Paten Sederhana - Hak Desain Industri - Hak Rahasia Dagang - Hak Merk - DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kepercayaan dan reputasi	Biro Hukum

9	119	- Permohonan HAKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) - Permohonan HAKI yang ditolak (Hak Cipta, paten Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusat Fasker
10	119	Kerjasama Dalam Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusat Fasker
11	193	Kerjasama Luar Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusat Fasker

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	480	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia.	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen
2		Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan : a. kliping koran b. brosur/leaflet/poster/plakat c. pengumuman pemberitahuan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen
3	489	Hubungan antar Lembaga Negara dan badan Pemerintah/Instansi a. Hubungan antar Lembaga Pemerintah b. Hubungan dengan Organisasi sosial/LSM c. Hubungan dengan perusahaan d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah termasuk magang,	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen

4		Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) e. Forum Kehumasan (Ditjen Bina Adwilohumas/Perhumas) f. Hubungan dengan media massa: 1) Siaran pers/konfrensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan 3) Wawancara Dengar pendapat/ <i>hearing</i> DPR	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen
5		Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Provinsi Kabupaten/Kota	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Adpim
6		Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen

7		Pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Puspen
8		Penghargaan/tanda kenang-kenangan administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	555	Strategis master plan Pembangunan Sistem Informasi	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin komtel
2		Dokumentasi Arsitektur - Sistem Informasi - Sistem Aplikasi - Infrastruktur	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin komtel

3		Dokumentasi Implementasi - Sistem Informasi - Sistem Aplikasi - Infrastruktur	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin komtel
4		Perekaman dan pemutahiran Data - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekam - Jadwal Pelasanaan -Laporan hasil perekaman dan pemutahiran data	Biasa/Terbuka	Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin komtel
5		Migrasi Sistem Aplikasi dan data - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar sistem Aplikasidan data yang dimigrasi - Laporan hasil migrasi	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin komtel
6		Dokumentasi <i>hosting</i> - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Pusdatin komtel

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	700	Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana Kerja Tahunan c. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian d. Penetapan Kinerja Tahunan Kementerian e. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen
2		Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)Pelaksanaan Pengawasan b. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen
			Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan	Itjen

		Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL)			tugas dan fungsi Kemendagri	
		c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen
		d. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen
		e. Laporan Pemutahiran Data	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen
		f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen

		g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen
		h. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Itjen

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	800	Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja 1. Analisis Jabatan 2. Beban Kerja b. Usulan Permintaan formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi PNS e. Penetapan Formasi Khusus	Biasa/Terbuka	Administator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian

2	810	Pengadaan Pegawai	Biasa/Terbuka	Administator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		a. Proses Penerimaan Pegawai				
		1) Pengumuman				
		2) Seleksi Administasi				
		3) Pemanggilan Peserta Test				
		4) Pelaksanaan Ujian Dinas				
		5) Wawancara				
		6) Keputusan Kelulusan				
		7) Pengumuman Kelulusan Keputusan Hasil Ujian				
		b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Administator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		c. Berkas lamaran yang tidak diterima	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan	Biro Kepagawaian
		1) Surat Lamaran				

3	820	2) Ijasah			fungsi Kemendagri	
		3) SKCK				
		4) Kartu Kuning				
		5) Surat Keterangan Kesehatan				
		e. Nota usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 tahun	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		Pembinaan Karier Pegawai				
		a. Diklat/kursus/tugas belajar/ujian dinas/izin belajar pegawai	Biasa/Terbuka	Administator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		- Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin				
		- Laporan Kegiatan Pengembangan Diri				
		b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/sertifikat	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		c. Ujian Kompetensi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Kepagawaian
		- Assessment Test Pegawai				
		- Pemetaan/Mapping Talent Pegawai				

4	825	d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
5	828	Mutasi Pegawai				
		a. Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, pemindahan sementara, mutasi antar unit b. Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
			Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Kepagawaian

		c. Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		d. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/perceraian 3) Surat Nikah/ceraai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Akte Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	821	e. Usul Kenaikan Pangkat/Golongan /Jabatan/Struktural/Fungsional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	830	f. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan	Biro Kepagawaian

6	831	g. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	832	h. Peninjauan masa kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	830	i. Berkas Baperjakat	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	850	Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	851	b. Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Biro Kepagawaian

	857	c. Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	Biasa/Terbuka	Administrator	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	856	d. Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	872	e. Cuti diluar Tanggungan Negara	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	863	f. Dokumen Identitas Pegawai 1) Usul Penetapan Kartu 2) Keanggotaan Organisasi 3) Laporan pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	841	4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai				

7	822	g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kependidikan (DUK)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	841.1	h. Berkas Pengurusan gaji berkala	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	870	i. Berkas tunjangan Kinerja dan uang makan	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	Kesejahteraan Pegawai					
	a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian	
b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian		

8		c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
		d. Berkas tentang Layanan Tabungan Pensiun	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	880	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Kepegawaian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
	9	881	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri
10	878	Organisasi non kedinasan, meliputi Korpri, Dharmawanita, Koperasi, yayasan Kemendagri	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian

11	880	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/janda/dudanya & PNS yang meninggal	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Kepagawaian
12		Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		a. Berkas lamaran yang diterima	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian

		c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		d. SK Pengangkatan CPNS	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		e. Hasil Pengujian Kesehatan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		f. SK Pengangkatan PNS	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap	Biro Kepagawaian

		g. SK Pengajuan Masa Kerja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	<i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		h. SK Kenaikan Pangkat	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	<i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		i. Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	<i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian

		j. SK Pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan Struktural/Fungsional	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		k. Berkas lamaran yang diterima	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	<i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		l. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	<i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		m. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	<i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian

		n. SK Pengangkatan CPNS	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		o. Hasil pengujian Kesehatan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		p. SK Pengangkatan CPNS	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian

		q. Berkas lamaran yang diterima	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		r. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		s. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		t. SK Pengangkatan CPNS	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian

		u. Hasil Pengujian Kesehatan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		v. SK Pengangkatan PNS	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		w. SK Pengajuan Masa Kerja	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak	Biro Kepagawaian

		x. SK Kenaikan Pangkat	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		y. Surat pernyataan melaksanakan tugas/menduduki jabatan/surat pernyataan pelantikan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian
		z. Pengangkatan PNS aa. Akta Nikah bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUPNS dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah ee. Surat Permohonan menjadi anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Kepagawaian

13	gg. Surat keterangan Meninggal Dunia hh. Surat Keterangan Peningkatan Jabatan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala ll. Surat tugas/Izin belajar dalam/luar mm. Surat izin Berpergian ke Luar Negeri nn. Kartu Pendaftaran Ulang PNS oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status PNS ss. SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS Berkas Perseorangan Menteri Dalam Negeri	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan	Biro Kepagawaian
----	--	---------	-------------------------	---	------------------

14	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. SK Gubernur dan Wakil Gubernur b. SK Bupati/Wakil Bupati c. SK Walikota/Wakil Walikota d. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Provinsi e. Pejabat Eselon I Pejabat Eselon II	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Ditjen Otonomi Daerah Biro Kepegawaian
----	--	---------	-------------------------	--	---

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	890	Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
2		Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
3		Modul-modul diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
4		Panduan fasilitator	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
5		Saran/Rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	BPSDM

6		Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan diklat Akreditasi Lembaga Diklat - Surat Permohonan Akreditasi - Laporan hasil verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Sertifikasi Akreditasi - Berita acara rapat Tim Penilai - Surat Keputusan Penetapan Akreditasi	Biasa/Terbuka	Administrator	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
7		Laporan Akreditasi Lembaga Diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
8		Sertifikasi Sumberdaya Manusia Kediklatan - Surat permohonan sertifikasi - Laporan hasil verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat Tim Penilai	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM

9	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Penetapan Akreditasi - Sertifikasi Akreditasi - Laporan sertifikasi individual Sistem Informasi Diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
10	<ul style="list-style-type: none"> - Data lembaga diklat - Data prasarana diklat - Data Sarana Diklat - Data pengelola diklat - Data penyelenggaraa Diklat - Data Widyaiswara - Data Program diklat Registrasi peserta diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
11	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan kode registrasi - Bukti registrasi - Surat penyampaian kode registrasi Rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
12	Rencana penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	BPSDM

13	Penyelenggaraan diklat <ul style="list-style-type: none"> - Surat pemanggilan peserta - Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat - Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat - Panduan Diklat - Laporan panitia penyelenggara Diklat - Sambutan pembukaan penyelenggaraan Diklat - Daftar peserta Diklat - Bahan ajar Diklat - Daftar hadir peserta Diklat - Formulir Evaluasi Diklat - Hasil Formulasi Evaluasi peserta diklat - Sertifikasi/STTPL - Sambutan penutupan Diklat - Buku induk 	Biasa/Terbuka	Administrator	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
14	Laporan Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	BPSDM

15		Evaluasi penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM
16		Evaluasi alumni pasca Diklat	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	BPSDM

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJANEGARA (RAPBN) DAN RUU APBN-P				
1	902	Penyusunan RAPBN a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas 1) Dokumen Rencana Strategis atas	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan	Biro Perencanaan

		Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahunan 2) Dokumen Rencana Kerja Tahunan b. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL) c. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) / Standar Biaya Khusus	Biasa/Terbuka	Administrator	fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
2	902	Penyampaian RAPBN Pemerintah kepada DPR-RI a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang APBN: Pidato Presiden Pengantar Nota 1) Keuangan 2) Nota Keuangan 3) RUU APBN b. Risalah rapat pembahasan Anggaran Kementerian Dalam Negeri dengan	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
			Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan

	Kementerian Keuangan, Bappenas, Komisi DPR-RI			pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	
	c. Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
	d. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN 1)Tanggapan masing-masing Fraksi 2)Jawaban Pemerintah atas tanggapan fraksi	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
	e. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan pembahasan RUU APBN dengan Komisi III DPR-RI	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
3	Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
4	Keputusan Presiden tentang Rincian APBN	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan

5	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya	Biasa/Terbuka	Administrator	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
6	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
7	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
8	Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P tanggapan masing-masing fraksi, jawaban Pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi.	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan
9	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P)	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Perencanaan

10		Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P	Biasa/Terbuka	Administrator	fungsi Kemendagri Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
1	910	PELAKSANAAN ANGGARAN Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran yang di keluarkan oleh Kemendagri	Biasa/terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
2		Dokumen Realisasi Pendapatan a. Surat Setoran Pajak	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
		b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
		c. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Keuangan dan Aset

		d. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
		e. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan masing-masing Satuan Kerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
		f. Berkas kelebihan pembayaran gaji atau tunjangan kinerja	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
		g. Penerimaan Pajak antara Pusat dan daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
		h. Dokumen Piutang Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset

3	i. Dokumen Pengelolaan Investasi, Penyertaan Modal Negara dan Sejenisnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
	j. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
	Belanja a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya 1)Barang habis pakai 2)Barang inventaris - Barang bergerak/barang inventaris - Tanah dan bangunan 3)Jasa 4)Software Komputer - Pengumuman Lelang - Dokumen prakualifikasi - Dokumen peninjauan Lapangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset

	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita acara pelelangan - Usulan calon Pemenang - Penetapan Pemenang - Surat Perintah Kerja (SPK) - Kontrak/Adendum Kontrak <p>Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Pengumuman lelang 2)Dokumen prakualifikasi 3)Dokumen 4)Berita acara penjelasan pekerjaan 5)Berita acara pelelangan 6)Usulan calon pemenang 7)Penetapan pemenang 8)Surat perintah kerja 9)Kontrak/addendum kontrak 				
	b. Dokumen pembayaran Keuangan: 1)Pengajuan Pembayaran Penarikan Kas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Biro Keuangan dan Aset

	<p>2) Bukti-bukti Tagihan dari Pihak Ketiga</p> <p>3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)</p> <p>4) Surat Perintah Membayar (SPM)</p> <p>5) Surat Perintah Pencairan Dana</p> <p>c. Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu:</p> <p>1) Buku Kas Umum (BKU)</p> <p>2) Buku Kas Pembantu (BKP)</p> <p>3) Buku/kartu pengawasan kredit anggaran</p> <p>4) Rekening Koran Bank</p> <p>5) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</p> <p>6) Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK)</p> <p>7) Daftar Rekapitulasi pihak ketiga</p> <p>8) Daftar Rekapitulasi PNB</p> <p>9) Izin Penggunaan Kas Besi</p> <p>d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium</p>	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Kemendagri Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Keuangan dan Aset
		Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak	Biro Keuangan dan Aset

	e. Kartu Gaji	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	kemitraan dan reputasi Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
	f. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI Kepada Badan Organisasi/Organisasi Internasional	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
	g. Dokumen Akuntansi Keuangan 1) Berita Acara Pemeriksaan Kas 2) Kas/ Register Penutupan Kas 3) Arsip Data Komputer (ADK) 4) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
	h. Verifikasi Anggaran 1) Nota Hasil Verifikasi (NHV) 2) Jawaban Nota Hasil Verifikasi (NJHV)	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset

		i. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2) Neraca 3) Laporan Arus kas (LAK) 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 5) Laporan Barang Milik Negara (BMN) 6) Laporan Realisasi Pendapatan Negara BANTUAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
1	910	Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
2		Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk membiayai (Green book)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
3		Dokumen Memorandum of Understanding (Mou), dan dokumen Sejenisnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset

4		Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
5		Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
6		Aplikasi penarikan Dana Pinjaman/hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya; - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payman/ Transfer Procedur</i> - <i>Special Account/ Imprest Fund</i> - Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri - <i>Notice Of Disbursement</i>	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
7		Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset

8		Realisasi Pencairan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu ; Surat Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya antara lain: SPP, Kontrak, Berita Acara, dan data pendukung lainnya	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
9		<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan dari Negara Donor) meliputi antara lain: <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>project Implementation, notification of Contract, Withdrawal Authorization</i> (WA), <i>Statement of Expenditure</i> (SE)	Terbatas	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
10		Staff Appraisal Report	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
11		Report/Laporan yang terdiri dari: - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> - <i>Final Report/Completion Report</i>	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset

12		Laporan Hutang Negara: Laporan Laporan pembayaran Hutang Negara	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
13		Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/hibah Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
1	910	PENGELOLAAN APBN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) Keputusan pengguna Anggaran tentang Penetapan: - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar gaji - Pejabat Penandatanganan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang termasuk berita acara serah	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset

1		SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
2		Kebijakan Akuntansi Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
3		Laporan Realisasi Sementara APBN	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
1	970	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Seluruh Unit Kerja
2		Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Biasa/Terbuka	Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Seluruh Unit Kerja

3		Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri	Biro Keuangan dan Aset
---	--	--	----------	-------------------------	--	------------------------

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

TJAHJO KUMOLO